

Daftar Pustaka

- Anjarwati, Mei. (2012). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Accounting Analysis Journal*, hal 2.
- Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. *Journal of Management*, 17 (1), 99-120.
- Bastian, Indra. (2001). *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*. BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Bisirinawati, Nuri. (2014). Rangkuman Rasio Profitabilitas. Tersedia di <http://akuntansipertanggungjawaban.blogspot.com/2014/01/rangkumanrasio-profitabilitas.html>, diakses pada 10 Desember 2017.
- Danim, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Pustaka Setia, Bandung.
- Downey, W. David dan Erickson, P Stephen. (1992). *Manajemen Agribisnis*. Erlangga, Jakarta hal.516.
- Duadji, Noverman. (2013). *Manajemen Pelayanan Publik (Wacana Konsep, Teori dan Problema Pelayanan Publik)*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Dunn, William N. (1994). *Public Policy Analysis: An Introduction, New Jersey: Pearson Education*. Edisi bahasa Indonesia diterjemahkan dari edisi kedua (1994) diterbitkan sejak 1999 dengan judul Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus. (2003). *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Harahap, S. Syafri. (2002). *Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Haruman, Tendi. (2010). *Penyusunan Anggaran Perusahaan*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Hogwood dan Gun, dalam Nugroho D, Riant, (2003). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT Elex Media. Komputindo, Jakarta.

- Keban, T. Yeremias. (2000). “*Good Governance*” dan “*Capacity Building*” sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan. Tersedia di https://www.bappenas.go.id/files/8214/0288/3124/yeremias_20091015151431_2389_0.pdf, diakses pada 29 September 2017.
- KEMENPAN-RB. *Refomasi Birokrasi*. Tersedia di <https://www.menpan.go.id/site/reformasi-birokrasi/makna-dan-tujuan>, diakses pada 10 Desember 2017.
- Mandey, A. Maya. Lengkong, P. K. Victor. (2015). Pengaruh Kompensasi, Gaya Kepemimpinan dan Llbngungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai (Studi Pada Fakultas Ekonomi Bisnis Unsrat). *Jurnal EMBA*, 3 (3), 1383-1394.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardikanto. (2009). *Sistem Penyuluhan Pertanian*. Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Margono. (2007). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Martoyo, K.S. (1992). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. BPFE, Yogyakarta.
- Maulidi, Ahmad. (2016). Pengertian Reformasi Birokrasi. Tersedia di <https://www.kanal.web.id/2016/11/pengertian-reformasi-birokrasi.html>, diakses pada 10 Desember 2017.
- Moleong, Lexy. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Karya, Bandung.
- Muktiali, Mohamad. (2009). Penyusunan Instrumen *Monitoring* dan Evaluasi Manfaat Program Pembangunan di Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 3 (2), 11-20.
- Mulyadi. (2001). *Sistem Akuntansi Edisi Tiga*. Salemba Empat, Jakarta.
- Notoatmodjo, Soekinto. (1992). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Ojha, Amitabh. Palvia, Shailendra. Gupta, M. P. (2008). 160 A Model for Impact of E-Government on Corruption: Exploring Theoretical Foundations. Tersedia di https://www.researchgate.net/publication/228369790_A_Model_for_Impact_of_E-Government_on_Corruption_Exploring_Theoretical_Foundations, diakses pada 29 September 2017.
- Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008). Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional FKIP UNTIRTA*, Serang, hal 9-10.

- Saaty, L. Thomas. (1986). *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin-Proses Hirarki Analitik Untuk Pengambilan Keputusan Dalam Situasi yang Kompleks*, (diterjemahkan oleh: I. K. Peniwati), IPPM, Pittsburgh.
- Saaty, L. T. dan Vargas, L. G. (2012). *Models, Methods, Concepts & Applications of the Analytic Hierarchy Process*. Springer, New York.
- Said, Z. Abidin. (2008). *Strategi Kebijakan dalam Pembangunan dan Ekonomi Politik*. Suara Bebas, Jakarta.
- Salusu, J. (1996). *Pengambilan Keputusan Strategik, Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. PT Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Siagian, P. Sondang. (1993). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Siregar, Marlianis. (2016). Perancangan Sistem Monitoring Berbasis Web untuk Pengumpulan Laporan Praktik Kerja Lapangan pada SMK Negeri 1 Kota Tangerang (*skripsi*). Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer, Tangerang.
- Soelendro, Ari. (2000). Paradigma Baru Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Makalah, Kongres Nasional Akuntan Indonesia IV. Jakarta, hal 13.
- Sumarsono, Sonny. (2009). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan Publik*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sumarsono, Sonny. (2003). *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Thoha, Miftah. (2003). *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. PT Raya Grafindo Persada, Jakarta.
- Wahyuningsih, Retno. (2016) Penegertian Evaluasi. Powerpoint. Tersedia di <https://buretno.files.wordpress.com/2016/09/1-pengertian-evaluasi1.pdf>, diakses pada 10 Desember 2017.
- Yunus, Hadori. (2000). Paradigma Baru Akuntansi Sektor Publik. *Makalah*, Kongres Nasional Akuntan Indonesia IV. Jakarta, hal 1.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Anggaran Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Jakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/PERMEN-KP/2014 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014. Jakarta.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019. Jakarta.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR.PER10/MEN/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Observasi Kelautan. Jakarta.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia NOMOR11/PERMEN-KP/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Observasi Laut. Jakarta.

Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 7.3/ Balitbang KP/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Lingkup Blitbang KP.

Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6Y/1999 Tanggal 20 September 1999 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.

Rencana Strategis Balai Riset dan Observasi Kelautan Tahun 2010-2014. Jemberana.

Rencana Strategis Balai Penelitian dan Observasi Laut Tahun 2015-2019. Jemberana.

Bpol.litbang.kkp.go.id

Brsdm.kkp.go.id